

**PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN
KETIDAKPATUHAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Sesumbagsel)**

SKRIPSI



Nama : Arwina Fitri Meulia

NIM : 222017065

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

**PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN
KETIDAKPATUHAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Sesumbagsel)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Arwina Fitri Meulia

NIM : 222017065

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arwina Fitri Meulia
NIM : 222017065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Dan Ketidapatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Keandalan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Sesumbagsel).

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.



Palembang, Agustus 2021


Arwina Fitri Meulia
222017065

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Dan Ketidakpatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Keandalan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Sesembagsel)

Nama : Arwina Fitri Meulia
NIM : 222017065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Agustus 2021

Pembimbing I,



Dr. Drs. Sunardi, S.E., M.Si.
NIDN/NBM : 0206046303/784021

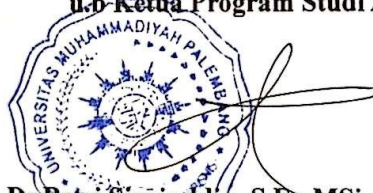
Pembimbing II,



Welly, S.E., M.Si.
NIDN/NBM:0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan

u-b Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri Sirajuddin, S.E., MSi., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Motto Dan Persembahan

Motto :

1. **Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.**
2. **Jangan Menunda Suatu Pekerjaan Sampai Besok Jika Hari Dapat Diselesaikan Maka Tuntaskanlah**
3. **Sabar tanpa batas, memaafkan tanpa menghitung, Ikhlas tanpa mengharap imbalan.**

(Arwina Fitri Meulia)

Dengan Izin-Mu dan Dengan Rahmat-Mu Ya Allah

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- ❖ **Mamaku Dan Papaku Tercinta**
- ❖ **Kakakku**
- ❖ **Keluargaku**
- ❖ **Dosen Pembimbingku**
- ❖ **Sahabat Dan Teman-Temanku**
- ❖ **Almamaterku**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat serta karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pada Opini BPK-RI Atas LKPD”. Skripsi ini diajukan oleh penulis dalam rangka melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Strata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Papa Pelda. Basdatomi dan Mama Tinawati yang telah mendidik, mendoakan, serta memberikan motivasi yang sangat besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Drs. Sunardi, S.E.,M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Welly, S.E.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta saran-saran dengan tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Yudha Mahrom DS, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mia Kusumawati, S.E., M.Si selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing penulis dari awal semester 1 hingga pada saat ini.
5. Bapak/Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Saudaraku Kakak Arian Dinata Putra Pertama yang selalu memberikan semangat, hiburan, dan dukungan penuh selama penulisan skripsi.
7. Tak lupa ucapan terima kasih untuk diriku sendiri yang telah kuat dan semangat hingga sejauh ini bisa sampai dititik sekarang.
8. Sahabat seperjuanganku Wiwid dan Naufa yang telah berjuang bersama dari awal semester 1 hingga saat ini.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi kebaikan kalian. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal, ibadah, dan kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2021
Penulis

Arwina Fitri Meulia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
HALAMAN ABSTRAK.....	xvi
HALAMAN ABSTRACT.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN	
HIPOTESIS.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Teori Keagenan.....	11
2. Keandalan Laporan Keuangan	12

3. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern.....	15
4. Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	21
B. Penelitian Sebelumnya.....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	28
D. Hipotesis.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Operasionalisasi Variabel.....	31
D. Populasi Dan Sampling.....	32
1. Populasi.....	32
2. Sampel.....	32
E. Data Yang Digunakan.....	34
F. Metode Pengumpulan Data.....	35
G. Analisis Data Dan Teknik Analisis.....	36
1. Analisis Data.....	36
2. Teknik Analisis.....	37
a. Statistik Deskriptif.....	41
b. Uji Asumsi Klasik.....	41
a) Uji Normalitas.....	41
b) Uji Multikolinearitas.....	42
c) Uji Heteroskedastisitas.....	43

d) Uji Autokorelasi.....	44
c. Uji Hipotesis.....	44
1) Analisis Regresi Berganda.....	44
2) Uji Hipotesis Bersama-sama (Uji F).....	45
3) Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	46
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Provinsi Sesumbagsel.....	48
a. Gambaran Umum Provinsi Jambi.....	48
b. Gambaran Umum Provinsi Bangka Belitung.....	50
c. Gambaran Umum Provinsi Lampung.....	51
d. Gambaran Umum Provinsi Bengkulu.....	53
e. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	54
B. Hasil Pengolahan Data Penelitian.....	56
1. Statistik Deskriptif.....	57
2. Uji Asumsi Klasik.....	58
a. Uji Normalitas Data.....	58
b. Uji Multikolinearitas.....	60
c. Uji Heteroskedatisitas.....	61
d. Uji Autokorelasi.....	62
3. Uji Hipotesis.....	62
a. Regresi Linier Berganda.....	62

b. Uji Hipotesis Secara Bersama-Sama (Uji F).....	64
c. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	65
A. Pembahasan.....	67
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Perkembangan Opini BPK Atas LKPD di Kabupaten/Kota Sesumbagsel.....	5
Tabel I.2 Jumlah Kelemahan SPI Pada LKPD di Kab/Kota Sesumbagsel.....	6
Tabel I.3 Jumlah Ketidapatuhan Pada Peraturan Perundang- Undangan Pada LKPD di Kab/Kota Sesumbagsel.....	7
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	31
Tabel III.2 Kabupaten/Kota Yang Menjadi Populasi.....	33
Tabel III.3 Kriteria Sampel.....	33
Tabel IV.1 Hasil Uji Descriptive Statistics.....	57
Tabel IV.2 Hasil Uji <i>One Sampel k-s</i>	60
Tabel IV.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	60
Tabel IV.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	62
Tabel IV.5 Uji Regresi Linier Berganda.....	63
Tabel IV.6 Hasil Pengujian Hipotesis F.....	65
Tabel IV.7 Hasil Pengujian Hipotesis t.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar IV.1 Hasil Pengujian Probability Plot.....	59
Gambar IV.2 Scatterplot.....	61

ABSTRAK

Arwina Fitri Meulia /222017065/2021/Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Ketidakpatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Keandalan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Sesumbagsel).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan daerah secara bersama-sama terhadap keandalan laporan keuangan. 2) Bagaimanakah pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan. 3) Bagaimanakah pengaruh ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Asosiatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 60 LKPD Kabupaten/Kota Sesumbagsel tahun 2018-2019 Sampel yang digunakan sebanyak 68 LKPD Kabupaten/Kota Sesumbagsel dengan metode *purposive sanpling*. Teknik Pengumpulan data yaitu dengan menggunakan analisis dokumen. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa 1) Secara bersama-sama, kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. 2) Secara parsial, Kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. 3) Secara parsial, Ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.


Kata Kunci : Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Keandalan Laporan Keuangan

ABSTRACT

Arwina Fitri Meulia /222017065/2021/The Effect of Weaknesses in the Internal Control System and Non-compliance with Legislative Provisions on the Reliability of Financial Statements (Case Study in Sesumbagsel Regency/City).

The formulation of the problem in this study is 1) How do the weaknesses of the internal control system and non-compliance with the provisions of regional laws together affect the reliability of financial statements. 2) How does the weakness of the internal control system affect the reliability of the financial statements. 3) How does non-compliance with statutory provisions affect the reliability of financial statements. The type of research used is associative research. The data used is secondary data. The population in this study was 60 Sesumbagsel Regency/City of Student worksheets in 2018-2019. The sample used was 68 Sesumbagsel Regency/City of Student worksheets using the purposive sampling method. The data collection technique is by using document analysis. The analytical method used is quantitative and qualitative. The analysis technique used is multiple linear regression. The results show that 1) Taken together, the weakness of the internal control system and non-compliance with the provisions of laws and regulations have a significant effect on the reliability of financial statements. 2) Partially, the weakness of the internal control system has a significant effect on the reliability of financial statements. 3) Partially, non-compliance with statutory regulations has no significant effect on the reliability of financial statements.

Keywords: Internal Control System Weaknesses, Non-compliance with Provisions of Laws and Regulations, Reliability of Financial Statements

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A158	Arwina Fitri Meulia	222017065	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan pada tiap-tiap daerah, Pemerintah daerah berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kepada pemerintah pusat, kemudian akan dijadikan laporan konsolidasi berupa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Dalam pasal 31 undang-undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan tugas-tugasnya ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat untuk para pengguna dalam menilai akuntabilitas serta membuat keputusan. Kriteria pembentuk kualitas informasi laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggantikan PP Nomor 24 tahun 2005 menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi beberapa karakteristik

yaitu: dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), keandalan (*reliability*), dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi keempat karakteristik tersebut untuk mencapai tujuannya, karena karakteristik tersebut merupakan syarat yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diidentifikasi melalui opini atas laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat apabila penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa keandalan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi laporan keuangan juga harus disajikan lengkap dengan mempertimbangkan materialitas dan biaya.

Sistem pengendalian intern yang baik diharapkan meningkatkan keandalan laporan keuangan, sehingga dapat menyakinkan para stakeholder maupun publik tentang keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah (Emy,2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dapat diandalkan agar bermanfaat bagi para pengguna, maka harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) yang baik. Sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2014: 163).

Undang-undang No. 60 tahun 2008 pasal 1 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 terdapat lima unsur sistem pengendalian intern, yaitu: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan pengendalian intern. Menurut Arisanti (2011) sistem akuntansi yang lemah menyebabkan kelemahan pengendalian internal dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pengambilan keputusan.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga merupakan faktor penentu tinggi atau rendahnya kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tindakan ilegal terhadap peraturan perundangundangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung yang material terhadap penyajian kualitas laporan keuangan (BPK,IHPS I, 2020). Peraturan perundang-undangan digunakan oleh BPK sebagai dasar pengujian untuk mendeteksi kecurangan yang menyimpang

dalam penyajian laporan keuangan. Pengujian atas kepatuhan akan disajikan oleh BPK ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berupa temuan ketidakpatuhan. Temuan ketidakpatuhan meliputi temuan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi 3 kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada keandalan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Moemahadi (2017) dan Emira (2020) dengan judul Pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan laporan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Faristina dan warsito (2015) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan *timeless* pelaporan keuangan badan layanan umum menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Filbert (2016), dan Emy dkk (2017) menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rofi (2017) dengan judul pengaruh sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini laporan keuangan dan untuk kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan.

Secara umum Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP dan WDP memiliki sistem pengendalian intern yang layak/memadai, Sedangkan LKPD yang memiliki TMP dan TW masih harus memerlukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengendalian intern. Maka disimpulkan bahwa semakin banyak temuan pemeriksaan pada LKPD menandakan bahwa semakin tidak efektif Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang terjadi pada suatu entitas pemerintah daerah atau semakin kecil peluang untuk mendapatkan opini WTP dan WDP.

Tabel I.1
Data Perkembangan Opini BPK atas LKPD
Di Kabupaten/Kota Sesumbagsel

Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Jumlah LKPD
2018	52	8	-	-	60
2019	55	5	-	-	60
Jumlah	107	13	-	-	120

Sumber: IHPS I, 2021 (data diolah kembali)

Tabel I.1 dapat dilihat bahwa LKPD di Kabupaten/Kota Sesumbagsel yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terdapat 52

LKPD yang memperoleh opini WTP, sementara pada tahun 2019 terdapat 55 LKPD yang memperoleh opini WTP. Artinya ada peningkatan sebanyak 3 LKPD yang memperoleh opini WTP. Sedangkan LKPD yang memperoleh opini WDP sebanyak 8 pada tahun 2018 menjadi 5 pada tahun 2019. Meningkatnya opini WTP dan WDP yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah menandakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perbaikan dan memiliki sistem pengendalian intern yang layak/memadai. Atas hal tersebut seharusnya sudah tidak ada lagi temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan kelemahan tersebut dalam laporan keuangan.

Tabel I.2
Jumlah kelemahan SPI pada LKPD
Di Kabupaten/Kota Sesumbagsel

NO	Provinsi Kab/Kota	Jumlah Kelemahan SPI	
		2018	2019
1.	Sumatera Selatan	84	83
2.	Lampung	78	71
3.	Bangka Belitung	38	40
4.	Bengkulu	56	66
5.	Jambi	49	58
Jumlah		305	318

Sumber: IHPS, 2021

Tabel I.2 dapat dilihat bahwa jumlah temuan kelemahan SPI mengalami peningkatan dari tahun 2018 ketahun 2019 yaitu pada tahun 2018 terdapat sebanyak 305 kelemahan SPI meningkat menjadi 318 kelemahan SPI pada tahun

2019. Peningkatan jumlah kelemahan SPI ini terjadi karena adanya permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan pengendalian internl. Pemeriksaan ini terdapat dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan memuat permasalahan yang tidak berdampak secara finansial (BPK-RI, 2017) .

Tabel I.3
Jumlah ketidakpatuhan pada perundang-undangan
pada LKPD di Kabupaten/Kota Sesumbagsel

NO	Provinsi Kab/Kota	Jumlah ketidakpatuhan	
		2018	2019
1.	Sumatera Selatan	111	116
2.	Lampung	106	98
3.	Bangka Belitung	66	60
4.	Bengkulu	75	73
5.	Jambi	74	70
Jumlah		432	417

Sumber: IHPS, 2021 (data diolah kembali)

Tabel I.3 dapat dilihat bahwa jumlah temuan ketidakpatuhan pada perundang-undangan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019, Penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan pada perundang-undangan ini terjadi karena adanya perbaikan permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi dan indikasi tindak pidana. Temuan ini terdapat dalam pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (BPK, 2017)

Berdasarkan tabel I.2 dan I.3 disimpulkan bahwa kelemahan SPI dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan pada tahun 2018-2019 mengalami sedikit perbaikan dengan berkurangnya jumlah ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan sebanyak 15 sedangkan kelemahan sistem pengendalian intern mengalami penurunan dengan meningkatnya jumlah kelemahan sebanyak 13.

Motivasi dalam penelitian ini, pentingnya sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap keandalan laporan keuangan harus diiringi dengan berkurangnya jumlah kelemahan sistem pengendalian intern, dan berkurangnya jumlah ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga akan menghasilkan keandalan laporan keuangan yang baik.

Berdasarkan fenomena, teoritikal gap dan riset gap yang telah terjadi maka penulis menganggap penelitian ini penting untuk diteliti kembali yaitu tentang **“Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Dan Ketidakpatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Keandalan Laporan Keuangan (Studi Kasis Pada Kabupaten/Kota Sumbangsel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan temuan fenomena yang ada didalam latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan daerah secara bersama-sama terhadap keandalan laporan keuangan ?
2. Bagaimanakah pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan ?
3. Bagaimanakah pengaruh ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara bersama-sama mempengaruhi keandalan laporan keuangan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan.

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan terhadap keandalan laporan keuangan.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis

Sarana untuk menambah wawasan, dan pemahan tentang pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada perundang-undangan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintahan daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah agar mendapatkan hasil kualitas laporan keuangan lebih baik lagi dari BPK-RI.

3. Bagi almamater

Sebagai referensi keilmuan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan, sebagai informasi dan dokumentasi data penelitian yang dapat dijadikan referensi perpustakaan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus Indratno. 2016. *Prinsip – Prinsip Dasar Akuntansi, Dunia Cerdas*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018. Jakarta: BPK-RI
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018. Jakarta: BPK-RI
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019. Jakarta: BPK-RI
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020. Jakarta: BPK-RI.
- Emira Suci Indah Lestari. (2020). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Dan Ketidakpatuhan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Emy Dwi Trisnani, Moh. Dimiyati, Hadi Paramu. (2017). Pengaru Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 11 No. 3. 2017: 271-282.
- Faiz Zamzami. (2014). *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faristina Rosalin dan Warsito Kawedar. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Disertasi Tidak Di Publikasikan.
- Filbert Adriel Djaya. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Skripsi. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Martina Dwi Aryanti. (2019). Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Temuan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan, Opini Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini BPK-

RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Di Sumatera Selatan. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Moermahadi Soerja Djanegara. (2017). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Vol. XXI No. 3. 2017: 461-483

Mulyadi. 2016. *Auditing* (Edisi: 6). Jakarta: Salemba.

Lam, Nelson. 2014. *Akuntansi Keuangan Perspektif IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.

Rofi Arif Setiawan. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Ketidakpatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar.

Romie Priyastama. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS Pengolahan Data & Analisis Data*. Yogyakarta: Start Up.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi kedua. Bandung: Alfabeta.

Uma Sekaran & Roger Bougie (2019). *Metode Penelitian Untuk Bisni*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

V. Wiratna Sujarweni. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Yuhanis Ladewi. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi I: Teori Dan Praktik*. Edisi 4. Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.